

GEPOLITIK INDONESIA

Anggi Akmaliza¹, Annisa Shakira Nehe^{2*}, Azron Muqsitin Sihotang³,
Baihaqy Hakim⁴, Eka Purmadana⁵, Hari Praswadi⁶, Maulidin Raziq⁷, Melda
Paulina⁸, Mhd. Rendi Darmawan⁹, Nurdiana¹⁰, Reza Suhada¹¹, Sahnia Sabina¹²

¹⁻¹²Program Studi Pancasila, Fakultas Pertanian, Universitas Asahan

*E-mail: ¹⁾ ichanche25@gmail.com

Abstract

Geopolitics of Indonesia have been formed since the time of the kingdom of Indonesia that began Srivijaya and Majapahit. It discusses strategies to Indonesia in maintaining his good- Indonesiaan in social, cultural, geographic, demographic, and Security in accordance with the purpose of the state or the nation's ideals. Therefore, various prerequisites must be met for the achievement of the ideals of the trip was guaranteed, such a precondition is called geopolitical, which are briefly formulated in the form of the Wawasan Nusantara. Thus, the role of conception, is in managing natural resources which can be used politically conscious citizenship plus state and nation. State of Indonesia is not just a scientific description but rather a long stake that limit the corridor between the dynamics of our society which is expected in between. When viewed in terms of ideology Pancasila principles are described sila-over descriptions of national ideals and supported by a summary of the core ideas of philosophy and science. The purpose of this paper is to discuss the integration of diversity that exist in Indonesia, let alone be seen from the geographical aspect of Indonesia lies between the two continents of Asia and Australia and two oceans namely the Indian and Pacific oceans are very prone to disintegration. Readings re-geohistoris Globalization and geopolitics have a very important role in regulating the policies put forward in the achievement of National Security of such ideals.

Keywords: *Geopolitical-geohistorical, Geographical, Archipelago Insight, National Resilience, Pancasila*

Abstrak

Geopolitik Indonesia telah dibentuk sejak masa kerajaan Indonesia yang mulai Sriwijaya dan Majapahit. Ini membahas strategi untuk Indonesia dalam mempertahankan kepentingannya Indonesia dalam hal sosial, budaya, geografis, demografis, dan keamanan sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita negara. Mulai dari masyarakat pribumi dalam pembentukan negara maritim geopolitik Sriwijaya yang merupakan penyebaran agama dan dicantumkannya jalinan sutra di selat malaka menuju daratan utama Asia tenggara lebih ke indocina, juga Majapahit dengan sebuah negara pertanian yang berhasil menyatukan kepulauan tersebut. Pada saat ini, semua warga indonesia dihadapkan pada berbagai jenis kendala, keragaman rakyatnya, konfigurasi geografis dan keadaan dinamika dampak lingkungan strategis tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu berbagai prasyarat harus dipenuhi untuk pencapaian cita-cita perjalanan dijamin, kondisi seperti itu disebut geo-politik, yang secara singkat dirumuskan dalam bentuk kepastinusantara. Dengan demikian peran dari konsepsi, adalah dalam mengelola sumber daya alam yang dapat digunakan secara politik sadar kewarganegaraan plus negara dan bangsa. Negara bagian Indonesia bukan hanya deskripsi ilmiah tetapi juga sebuah pasak panjang yang membatasi koridor antara dinamika masyarakat kita yang diharapkan di antara kedua Pembacaan

²Program Studi Pancasila, Fakultas Pertanian, Universitas Asahan

Annisa Shakira Nehe

*E-mail: ichanche25@gmail.com

ulang geohistoris dan geopolitik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian keamanan nasional cita-cita tersebut.

Kata kunci: Geopolitik-geohistoris, Geographical, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Pancasila

PENDAHULUAN

Konsep Nusantara dianggap mewakili dengan apa yang dinamakan National-Staat seperti yang diucapkan Soekarno saat ia berpidato Lahirnya Pancasila lewat penekanan “kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter”. Ditambahkan pula, untuk penegasan wilayah Indonesia, Ir. Soekarno, 1945 menambahkan tentang peradaban National-Staat yang dianggap menemupuncak kejayaan saat Imperium Sriwijaya dan Imperium Majapahit. Disini meluruskan bahwa konsep Nusantara itubukan sebagai Negara Kepulauan yang terdiri dai beberapa pulau tetapi melainkan konsep Nusantara sebagai Negara Maritim yang sebagai penghubung dari beberapa pulau dan itu sebagai pengontrol andmemanfaatkan laut sebagai syarat darijalur perdagangan dan mencapai kesejahteraan (Sakti & Widodo, 2012).

Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang hakiki atas kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan budi nuraninya(Wulandari et al., 2022). Namun kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Ketidaksamaan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, kehidupan, kepercayaan dalam hubungan dengan penciptanya dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya, dan dalam cara melihat serta memahami sesuatu. Perbedaan-perbedaan inilah yang kitasebut keanekaragaman (Dwi Sulisworo, 2012a). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya.

Suatu bangsa yang telah menegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh ini timbul dari hubungan timbal balik antara filososfi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayahnya serta pengalaman sejarahnya (I. Astawa et al., 2017). Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan” itu sendiri berasal dari kata wawas (bahasa

Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah berarti: cara penglihatan atau cara pandang

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi telah perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalam mengejar kejayaannya (Rahman et al., 2020).

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama, yaitu:

- a. Bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup.
- b. Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya.
- c. Lingkungan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur berdasarkan pada eksplorasi literatur dari hasil kajian-kajian terdahulu. Literatur-literatur tersebut berupa buku, hasil survey, media *online*, dan artikel penelitian nasional hingga internasional (Satria, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan” itu sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah berarti: cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang.

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam ekstensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global (Alav, 2016).

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama yaitu, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup, jiwa tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya dan lingkungan sekitarnya (Humaira, 2021).

Teori – Teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata “ego” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan–pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif

kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut:

A. Pandangan Ajaran Freedich Ratzel

Pada abad ke-19, Freedich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal.

- a. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
- b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan (teori ruang, konsep ruang).
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, kecuali bangsa yang unggul akan bertahan hidup terus dan langgeng.
- d. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam.

B. Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen

Kjellen menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai “prinsip dasar”.

- a. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup, yang memiliki intelektual. Rakyat membutuhkan ruang cukup luas untuk berkembang.
- b. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik dan krato politik (politik memerintah).
- c. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar.

C. Pandangan Ajaran Karl Haushofer Teori ini berkembang di Jerman, saat berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler dan di Jepang dalam ajaran Hako Ichu yang dilandasi semangat militerisme dan fasisme.

- a. Kekuasaan Imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.
- b. Beberapa negara besar di dunia akan timbul menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- c. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan dan merupakan landasan bagi tindakan politik.

D. Pandangan Ajaran Sir Halford Mackinder

Teori geopolitik ini menganut konsep “konsep kekuatan” dan mencetuskan Wawasan Benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan: barang siapa menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika yang akhirnya dapat menguasai dunia (Suradinata, 2001b).

E. Pandangan Ajaran Sir Walter dan Alfred Theyr Mahan

Kedua ahli mengungkapkan gagasan “Wawasan Bahari”, yaitu kekuatan di lautan. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga akhirnya menguasai dunia.

F. Pandangan Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller

Keempat ahli berpendapat bahwa kekuatan dunia di udara justru yang paling menentukan atau “Wawasan Dirgantara”. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya di kandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.

G. Pandangan Ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan Teori Daerah Batas (*rimland*), yaitu wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut dan udara. Teori ini disesuaikan dengan kondisi Negara.

Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Dalam Rangka Menelaah Geostrategi

Kita tidak boleh lepas dari landasannya terutama geopolitik dan konsepnya adalah ketahanan nasional

A. Geopolitik

Ilmu Geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan, serta kemampuan untuk Ketahanan Nasional. Pada hakikatnya geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI, berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional.

B. Geostrategi

Konsepsi dasar dari Geostrategi Indonesia adalah Ketahanan Nasional, berdimensi Astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata (Carter & Chalk, 1998). Astagatra meliputi Trigatra Alamiah dan Pancagatra Sosial. Trigatra Alamiah terdiri dari Geografi (wilayah), sumber kekayaan alam dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan disingkat Ipoleksosbudhankam. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan Trigatra Alamiah guna meningkatkan Ketahanan pada Pancagatra (Suradinata, 2001a).

Ajaran Wawasan Nasional

Indonesia Wawasan Nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia.

A. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai: “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. “Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih pesengketaan dan ekspansionisme (Dinata, 2020). Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia mengatakan bahwa: ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya (Tarigan, 2013). Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

B. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negaranegara Barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah

“penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan

Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari:

A. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia.

B. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara

Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata. Kondisi obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan suatu ruang gerak hidup bangsa yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi keputusan politik negara tersebut. Kondisi obyektif geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa dan letak posisi yang strategis.

Wilayah Indonesia saat 17 Agustus 1945 masih mengikuti *Territoriale Zee En Marittieme Kringen Ordonantie* tahun 1939, di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan wilayah laut 3 mil tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pergolakan-pergolakan negeri saat itu.

Atas pertimbangan berbagai hal, dimaklumkanlah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang berbunyi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian

daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.

Penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia,...”. Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri dan merupakan satu kesatuan utuh dengan kekayaan alam didalamnya. Ditetapkanlah Undang-undang Nomor : 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu berubahlah luas wilayah dari + 2 juta km² menjadi + 5 juta km², dimana + 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan. Karena itu tidaklah mustahil bila negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan (negara maritim. Sedangkan yang + 35% lagi adalah daratan yang terdiri dari 17.508 buah pulau yang antara lain berupa 5 (lima) buah pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua) dan + 11.808 pulau-pulau kecil yang belum tersebut adalah +2.028.087 km², dengan panjang pantai + 81.000 km. Topografi daratannya berupa pegunungan dengan gunung-gunung berapi yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi. Sekarang pengertian kata Nusantara adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil yang berada pada batas-batas astronomi berikut: Utara : 06 08 LU Selatan : 11 15 LS Barat : 94 45 BT Timur : 141 05 BT Dan jarak Utara – Selatan : + 1.888 km Barat – Timur : + 5.110 km Melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982, asas negara kepulauan ini diakui dalam UNCLOS 82 (*United Nation Convention on the Law of the Sea*). Berlakunya UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara, berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan, seperti bertambah luasnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontingen Indonesia. Dengan adanya UNCLOS 82 memberi keuntungan bagi pembangunan nasional yaitu, bertambahnya kekayaan alam Indonesia dan laut sebagai medium transportasi.

C. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Indonesia

Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang muncul karena pengaruh ruang hidup berupa kepulauan di mana ciri alamiah tiap-tiap pulau berbedabeda. Faktor alamiah itu membentuk perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Secara

universal, kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur penting berikut: pertama, sistem religi dan upacara keagamaan; kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; ketiga, sistem pengetahuan; keempat, bahasa; kelima, keserasian (budaya dalam arti sempit); keenam, sistem mata pencaharian; dan ketujuh, sistem teknologi dan peralatan.

Dari perbedaan ciri alamiah dan unsur-unsur penting kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, tampak perbedaan lahiriah antara orang Jawa dan orang Batak, atau antara orang Manado dan orang Irian (Papua), baik dalam hal penampilan pribadi maupun dalam hubungan berkelompok (bermasyarakat).

Dari ciri ruang hidup yang menjadi asal-usul suatu masyarakat, seseorang dapat dengan mudah mengenali perbedaan umum antara masyarakat pantai (nelayan) yang berani menentang alam, dinamis, agresif serta terbuka dan masyarakat petani yang teratur mengikuti ritme alam, mementingkan keakraban, dan kurang terbuka; atau antara masyarakat desa yang masih memegang teguh nilai-nilai religius, kekerabatan serta paguyuban dan masyarakat kota yang cenderung materialistis, individual, dan patembayan.

Bangsa Indonesia yang menegara pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil dari satu proses perjuangan panjang yang secara embrional muncul melalui kesepakatan moral dan politik sejak pergerakan Budi Utomo tahun 1908. Artinya, nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak akan terwujud secara lengkap dan sempurna hanya dengan sekali usaha bersama berupa ikrar bersama (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928) atau secara politik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari tinjauan sosial budaya tersebut, pada akhirnya dipahami bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi dan melakukan hal-hal positif diantara serta masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan secara harmonis.

D. Latar belakang pemikiran aspek Kesejarahan Bangsa Indonesia

Sejarah Indonesia pun diawali dari negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di wilayah nusantara melalui kedaulatan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kaidah-kaidah sebagai negara modern, seperti rumusan falsafah negara belum jelas dan konsepsi cara pandang belum ada. Yang ada adalah slogan-slogan seperti yang ditulis oleh mpu Tantular: *Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva*. Perjuangan berikutnya, nuansa

kebangsaan mulai muncul pada tahun 1900an ditandai dengan lahirnya konsep baru dan modern yaitu Proklamasi Kemerdekaan dan proklamasi penegakan negara merdeka.

Awal semangat dipelopori oleh organisasi Budi Oetomo (20 Mei 1908), yang sekarang disebut Hari Kebangkitan Nasional dan dicetuskan dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928): Satu Nungsa, Satu Bangsa dan menjunjung tinggi Bahasa Nasioanal Indonesia. Dalam kongres pemuda lagu Indonesia Raya pertama kalinya dikumandangkan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan kolonial Hindia Belanda di mana batas wilayah perairan ditentukan dan diakui berdasarkan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939.

Berdasarkan TZMKO, laut teritorial adalah selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau. Kemudian berubah dari 3 mil menjadi 12 mil laut melalui Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957). Kata nusantara itu sendiri berasal dari kata “Nusa” yang berarti pulau dan “Antara”. Jadi, artinya adalah pulau-pulau yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) serta dua (Samudra Pasifik dan Hindia). Konsepsi nusantara yang berlandaskan semangat kekompakan dan mengacu pada konstelasi geografi RI sebagai negara kepulauan dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4/Prp tahun 1960 yaitu:

- a. Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
- b. Laut wilayah Indonesia ialah Jalur laut 12 mil laut.
- c. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar (Suradinata, 2001b).

Dasar Hukum Wawasan Nusantara

Dasar hukum wawasan nusantara warganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut.

- TAP MPR. NO. IV/MPR/1973 Pada tanggal 22 maret 1973.
- TAP MPR. NO IV/1978/22/MARET/1978/ tentang GBHN.
- TAP MPR. NO. II/MPR/1983/12/MARET/1983(I. N. T. Astawa, 2016)

A. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan,

terbentuklah satu Wawasan Nasional Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini berkembang sebagai berikut:

- a. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GHBN. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Ketetapan Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN- UI) “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.” Hal tersebut disampaikan pada waktu lokakarya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Lemhannas pada bulan Januari tahun 2000. Ia juga menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara merupakan Geopolitik Indonesia.
- c. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Kelompok Kerja Wawasan nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhannas tahun 1999. “Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

B. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

- a. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, yaitu terwujudnya pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- b. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
- c. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan

menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup atau karunia Sang Pencipta.

- d. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan hukum, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia

Tantangan Implementasi

Berbagai masalah dalam implementasi otonomi daerah dapat berasal dari sikap mental para penguasa daerah dan rakyatnya, perolehan keuangan daerah, atau kualitas aparatur pemerintah daerah.

A. Sikap mental

Sikap para penguasa daerah dan rakyatnya, yang mempersepsikan diri sebagai pihak yang harus dilayani oleh rakyatnya, menciptakan raja-raja kecil didaerah, peraturan dibuat untuk kepentingan dan keberlanjutan kursi kekuasaan.

B. Kewenangan

Kewenangan pemerintah mengenai tugas dan tanggung jawab ataupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

C. Pemasukan Keuangan Daerah

Penguasa daerah membuat peraturan yang memungkinkan memperoleh pendapatan asli daerah dengan mengorbankan rakyatnya melalui berbagai pungutan pajak dan pungutan retribusi lain yang memberatkan penduduk.

D. Aparatur Pemerintahan Daerah

Rendahnya kualitas aparatur pemerintahan daerah karena system rekrutmen yang kolusi dan nepotisme mengabaikan kemampuan dan profesionalitas (Dwi Sulisworo, 2012).

Ajaran Dasar, Unsur Dasar Dan Konsepsi Dan Asas Wawasan Nusantara

A. Ajaran Dasar Wawasan Nusantara

- a. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia dan diberi nama Wawasan Nusantara, disingkat “Wasantara.” Dari pengertian- pengertian seperti

diatas, pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara ialah Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

- b. Landasan Idiil: Pancasila Pada hakikatnya Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan kekeluargaan kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Perpaduan nilai-nilai tersebut mampu mawadahi kebhinekaan seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber motivasi bagi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam tekadnya untuk menata kehidupan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, para pimpinan pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.
- c. Landasan Konstitusional: UUD 1945 UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu, negara mengatasi segala paham golongan, kelompok dan perseorangan serta menghendaki persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional berdasarkan aturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini.

B. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

a. Wadah (*Contour*)

Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam

kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik.

b. Isi (*Content*)

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi yang menyangkut dua hal yang esensial yaitu:

- 1) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
- 2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

c. Tata Laku (*Conduct*)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air sehingga menumbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

C. Asas Wawasan Nusantara

- a. Kepentingan yang sama, ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi jenis “penjajahan” yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara Adu Domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalil Hak Asasi Manusia, demokrasi dan lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan merasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.

- b. Keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah usaha dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah.
- c. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak di lingkungannya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan.
- d. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
- e. Kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar, dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
- f. Kesetiaan, terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia, yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Oetomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika kesetiaan ini goyah apalagi ambruk, maka kebhinekaan Indonesia akan berantakan dan hilangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Arah Pandang Wawasan Nusantara

- a. Arah Pandang ke Dalam Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.
- b. Arah Pandang ke Luar Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya

maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

E. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan

- a. Kedudukan Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:
 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiiil.
 2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
 3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
- b. Fungsi Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu- rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Tujuan Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah.

KESIMPULAN

Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Selain itu, didalam pelaksanaanya, suatu wawasan nusantara lebih mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan guna mencapai tujuan nasional. Hal ini mewujudkan keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara. Intinya, bagi bangsa

Indonesia pengertian geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengena mengenal lingkungannya, yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Alav, Ö. (2016). Demokrasi. *Pegem Atf İndeksi*, 177–201.
- Astawa, I., Ari, P., & Pt, S. (2017). Materi kuliah kewarganegaraan. *Universitas Udayana (13)*, 5.
- Astawa, I. N. T. (2016). Teori-Teori Dalam Dunia Pendidikan Modern. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 67–72.
- Carter, A., & Chalk, P. (1998). Introduction: Threats to Liberal Democracy. *Australian Journal of Politics & History*, 44(3), 325–328.
- Dinata, F. R. (2020). Pembelajaran Humanistik Dalam Mendorong Pengembangan Afeksi. *Al-Tibbar: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 48–57.
- Dwi Sulisworo, T. (2012a). Geopolitik Indonesia. *Universitas Ahmad Dahlan: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Humaira, A. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*.
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2).
- Sakti, T. P., & Widodo, R. (2012). Studi Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Pancasila. *Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies Unity, Diversity and Future*.
- Satria, B. (2020). Implementation Of Additive Ratio Assessment (ARAS) Method On Decision Support System For Recipient Of Inhabitable House. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, 6(1), 121–128.
- Suradinata, E. (2001a). Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2001).
- Suradinata, E. (2001b). Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, P. B. (2013). Implentasi Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wulandari, S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Rasa Toleransi di Kalangan Siswa Sekolah Dasar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 981–987.